



Article Informations
Corresponding Email:
divaayulstr@gmail.com

Received: 24/07/2025; Accepted:
20/09/2025; Published: 15/10/2025

DAMPAK KEBANGKITAN TALIBAN TERHADAP KEAMANAN NASIONAL PAKISTAN TAHUN 2021

Diva Ayu Lestari

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini membahas dampak kebangkitan kembali kekuasaan Taliban di Afghanistan terhadap keamanan nasional Pakistan pada tahun 2021. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yang berfokus pada data sekunder dari laporan lembaga internasional, artikel ilmiah, dan berita daring. Kebangkitan Taliban membawa konsekuensi besar terhadap stabilitas regional, khususnya bagi Pakistan yang berbatasan langsung dengan Afghanistan. Penelitian ini menganalisis lima aspek keamanan nasional berdasarkan teori Barry Buzan, yaitu keamanan militer, politik, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan Taliban berdampak pada meningkatnya ancaman militan lintas batas, ketegangan diplomatik, krisis pengungsi, penurunan aktivitas ekonomi lintas perbatasan, dan meningkatnya radikalisme di dalam negeri. Dengan demikian, kebangkitan Taliban bukan hanya persoalan internal Afghanistan, tetapi juga menjadi tantangan eksternal yang serius bagi keamanan nasional Pakistan.

Kata Kunci: Taliban, Pakistan, keamanan nasional, radikalisme, **pengungsi**

Abstract

This study examines the impact of the Taliban's resurgence in Afghanistan on Pakistan's national security in 2021. A qualitative approach with descriptive-analytical methods was used, relying on secondary data from international reports, academic articles, and online news sources. The Taliban's return to power has brought significant consequences to regional stability, especially for Pakistan, which shares a direct border with Afghanistan. This research analyzes five dimensions of national security based on Barry Buzan's theory: military, political, environmental, economic, and societal security. The findings indicate that the Taliban's rule has led to increased cross-border militant threats, diplomatic tensions, refugee crises, declining cross-border economic activity, and rising radicalization within Pakistan. Therefore, the

Taliban's resurgence is not merely an internal Afghan issue but also poses a serious external challenge to Pakistan's national security.

Keywords: *Taliban, Pakistan, national security, radicalization, refugees*

1. PENDAHULUAN

Kemenangan Taliban dalam merebut kembali kekuasaan di Afghanistan pada tahun 2021 setelah penarikan pasukan Amerika Serikat membawa dampak besar bagi stabilitas kawasan, khususnya Pakistan. Pakistan berbatasan langsung dengan Afghanistan sepanjang lebih dari 2.600 kilometer dan memiliki sejarah hubungan kompleks dengan Taliban, mulai dari dukungan strategis hingga konflik kepentingan domestik. Kebangkitan Taliban memunculkan tantangan baru bagi keamanan nasional Pakistan, mulai dari ancaman militan lintas batas, meningkatnya arus pengungsi, hingga ketegangan sosial dan politik dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebangkitan Taliban terhadap keamanan nasional Pakistan dengan menggunakan pendekatan teori keamanan Barry Buzan yang memetakan lima sektor utama: militer, politik, lingkungan, ekonomi, dan sosial.

2. PEMBAHASAN

2.1 Sektor Keamanan Militer

Sektor keamanan militer merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan antara Afghanistan dan Pakistan. Perbatasan tersebut merupakan bagian dari kedaulatan negara yang harus dijaga agar tidak terganggu oleh ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Ancaman dari dalam (non negara) diantaranya kelompok militan domestik yang beraliran keras. Kelompok-kelompok militan tersebut umumnya tersebar di wilayah perbatasan antara kedua negara. Beberapa aspek utama dalam analisis sektor militer ini meliputi keberadaan kelompok militan,

kontrol perbatasan, basis militan, dan ketegangan di wilayah perbatasan.

2.1.1 Kelompok-kelompok Militan di perbatasan

Wilayah perbatasan antara Pakistan dan Afghanistan, dengan kondisi geografis yang sulit dan terpencil, sangat memungkinkan kelompok militan beroperasi secara tersembunyi. Kelompok-kelompok yang aktif di kawasan tersebut antara lain Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), Lashkar-e-Taiba (LeT), dan Haqqani Network. Meskipun memiliki latar belakang ideologi dan tujuan yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama yaitu melakukan aktivitas yang umumnya bertujuan mengancam kedaulatan Pakistan. Selain itu, terdapat juga jaringan jihad transnasional seperti al-Qaeda dan ISIS-K (*Islamic State Khorasan Province*) yang juga berada di wilayah perbatasan. Konflik bilateral yang signifikan sebelum 2021 yaitu ketegangan antara Pakistan dan India terkait wilayah Kashmir, serta konflik regional dengan kelompok militan seperti TTP yang sering melancarkan serangan terhadap aparat keamanan dan warga sipil di Pakistan.

2.1.2 Kontrol Perbatasan

Kontrol perbatasan menjadi tantangan utama bagi Pakistan, terutama karena kondisi geografis yang sulit di sepanjang Garis Durand (*Durand Line*). Garis Durand merupakan garis demarkasi yang ditetapkan pada tahun 1893 sebagai hasil perjanjian antara Pemerintah India Britania dan Emir Afghanistan, Abdur Rahman Khan. Garis ini membentang sepanjang 2.640 kilometer melewati wilayah-wilayah pegunungan yang terjal dan terpencil, menjadikan kontrol administratif atas perbatasan ini sangat sulit dilakukan, baik oleh Afghanistan maupun Pakistan setelah kemerdekaannya. Geografis seperti ini

sulit untuk melakukan pengawasan dan pengendalian lalu lintas kelompok militan, penyelundup, maupun pengungsi.

2.1.3 Basis Militan

Kelompok militan memanfaatkan wilayah perbatasan yang sulit dijangkau sebagai basis operasi, tempat persembunyian, dan pusat pelatihan. Mereka juga memanfaatkan jaringan sosial dan logistik lokal di daerah suku sebagai basis rekrutmen dan distribusi logistik. Faktor geografis, lemahnya kontrol negara, serta kompleksitas sosial politik setempat membuat wilayah ini menjadi lokasi yang ideal sebagai basis tempat berkembangnya kelompok militan maupun kelompok radikal keras lainnya.

2.1.4 Ketegangan-ketegangan di wilayah Perbatasan

Garis Durand menjadi sumber ketegangan bilateral yang multidimensional, meliputi faktor historis, geopolitik, etno kultural, dan keamanan. Afghanistan (Taliban) menolak pengakuan Garis Durand, yang memicu ketegangan dengan Pakistan dan potensi konflik militer. Selain itu, keberadaan kelompok lintas batas seperti TTP dan komunitas suku Pashtun di kedua sisi perbatasan juga menyebabkan konflik dengan pasukan perbatasan, terkait dengan pembangunan pagar dan pos-pos militer dikawasan tersebut.

2.2 Sektor Keamanan Politik

Situasi politik Pakistan dapat dianalisis melalui beberapa aspek diantaranya adalah: aspek stabilitas domestik, aspek pengaruh diplomasi, aspek kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aspek kelompok Islamis domestik.

2.2.1 Stabilitas Domestik

Politik domestik Pakistan menunjukkan dualisme kekuasaan antara sipil dan militer, dengan lingkungan

keamanan yang rentan akibat aktivitas kelompok ekstremis seperti TTP. Walaupun operasi militer seperti Zarb-e-Azb (2014) dan Radd-ul-Fasaad (2017) berusaha unyuk menekan kelompok militant tersebut namun serangan secara sporadis tetap saja terjadi.

Di bidang ekonomi, ketergantungan pada pinjaman luar negeri dan inflasi tinggi turut memperburuk ketidakstabilan ekonomi negara tersebut. Disamping itu kondisi sosial yang terpecah belah akibat perbedaan etnis dan sektarianisme juga turut memicu kerusuhan.

2.2.2 Pengaruh Diplomasi

Pakistan memegang peranan penting dalam dinamika Asia Selatan melalui kebijakan luar negeri yang kompleks khususnya yang terkait dengan Afghanistan. Meskipun Pakistan mendukung proses perdamaian seperti *Afghan Peace Talks* di Doha namun Pakistan juga diisukan memberikan bantuan dan perlindungan kepada Taliban di wilayah perbatasan sebelum Taliban kembali berkuasa dengan harapan kedepannya Taliban dapat membantu mengatasi pergerakan kelompok militan seperti TTP yang sering mengganggu.

2.2.3 Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah

Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah Pakistan mengalami fluktuasi akibat dinamika politik, ekonomi, dan keamanan. Survei Gallup Pakistan pada 2020 menunjukkan bahwa hanya sekitar 35% warga yang puas dengan kinerja pemerintah, sementara mayoritas mengeluhkan pengangguran, inflasi, dan isu keamanan. Militer lebih dipercaya masyarakat dibandingkan pemerintah sipil dalam menangani isu-isu strategis.

2.2.4 Kelompok Islamis Domestik

Pakistan memiliki berbagai kelompok Islamis domestik dengan ideologi beragam. Salah satunya adalah Jamaat-e-

Islami (JI) merupakan kelompok Islamis paling berpengaruh yang berperan aktif dalam politik dan pendidikan keagamaan. Kelompok militan seperti TTP, LeT, dan Jaish-e-Mohammed (JeM) juga berperan signifikan, beberapa di antaranya terkait konflik Kashmir. Kelompok sektarian seperti Sipah-e-Sahaba Pakistan (SSP) dan Lashkar-e-Jhangvi (LeJ) dikenal karena kekerasan terhadap minoritas kaum Syiah.

2.3 Sektor Keamanan Lingkungan

Untuk mengetahui kondisi lingkungan di wilayah perbatasan dapat dianalisis dari beberapa sisi antara lain yaitu kondisi sumber daya alam dan infrastruktur, pemanfaatan lahan dan kondisi lingkungan perbatasan akibat konflik yang terjadi.

2.3.1 Kondisi Sumber daya alam dan infrastruktur

Sumber Daya Alam. Kondisi Sumber Daya Alam. Wilayah perbatasan secara geografis didominasi oleh pegunungan dan lembah, terutama di sepanjang garis Durand yang memiliki panjang lebih dari 2.600 kilometer. Daerah ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup menjanjikan untuk kesejahteraan masyarakatnya seperti batu bara, batu permata terutama di wilayah Khyber Pakhtunkhwa dan Provinsi Nangarhar, selain itu juga terdapat hasil hutan non-kayu yang juga dimanfaatkan oleh komunitas lokal. Namun, eksploitasi sumber daya ini belum tergali sepenuhnya sehingga belum dapat dinikmati oleh masyarakatnya.

Infrastruktur. Selain sumber daya alamnya yang belum tergali Infrastruktur di wilayah ini juga masih sangat tertinggal jika dibandingkan kawasan lain. Meskipun terdapat jalur penghubung utama namun sebagian besar wilayah perbatasan tetap sulit dijangkau karena buruknya kondisi jalan dan minimnya sarana transportasi. Konflik

bersenjata atau serangan kelompok militan dan lemahnya koordinasi lintas batas merupakan kendala bagi negara ini dalam pembangunan proyek-proyek jalan dan jembatan yang didanai oleh pemerintah Pakistan atau mitra internasional. Selain itu, akses terhadap layanan dasar seperti listrik dan air bersih juga sangat terbatas. Mayoritas hidup masyarakat lokal sangat tergantung kepada sektor pertanian dan perdagangan tradisional

2.3.2 Pemanfaatan lahan di Perbatasan.

Sebagian besar pemanfaatan lahan perbatasan di Pakistan digunakan untuk sektor pertanian. Sektor ini berperan penting dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat.. Sekitar 48% dari total luas lahan negara ini digunakan untuk keperluan pertanian, khususnya di daerah Punjab dan Sindh, yang memiliki akses terhadap sistem irigasi dari Sungai Indus. Lahan pertanian pada umumnya digunakan untuk menanam gandum, kapas, padi, dan tebu, yang merupakan komoditas utama ekspor dan konsumsi domestik.

Di samping sektor pertanian, Pakistan juga memiliki lahan lainnya yang gersang dan semi-gersang yang pemanfaatan lahannya cenderung terbatas pada pertambangan,

2.3.3 Kondisi Lingkungan Perbatasan Akibat Konflik

Wilayah perbatasan khususnya sepanjang **Garis Durand** telah lama menjadi kawasan yang rentan terhadap konflik bersenjata dan merupakan tempat para aktivitas militan. Konflik-konflik yang terjadi di kawasan perbatasan tersebut. menyebabkan kerusakan berat terhadap kondisi lingkungan fisik.

Kegiatan kelompok militan yang memanfaatkan wilayah hutan untuk persembunyian dan pelatihan militer. mengakibatkan kerusakan pada tanah dan sistem

irigasi lokal. Kerusakan-kerusakan ini berdampak pada hilangnya mata pencaharian masyarakat setempat yang kehidupannya bergantung pada pertanian. Selain itu **terjadinya gelombang pengungsian yang diakibatkan dari konflik Afghanistan** menambah tekanan pada lingkungan di wilayah tujuan terlebih dengan adanya pembuatan kamp-kamp pengungsi yang tidak memperhatikan dampak lingkungan. Kurangnya pengawasan eksploitasi sumber daya alam dari pemerintahan yang efektif di sepanjang perbatasan turut memperburuk kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kelompok militan bersenjata maupun kelompok lainnya.

2.4 Sektor Keamanan Ekonomi

Dalam konteks sektor keamanan ekonomi dapat dianalisis dalam beberapa bagian diantaranya, yaitu: Kondisi fiskal, perkembangan investasi asing dan situasi perdagangan lintas batas.

2.4.1 Kondisi Fiskal di Pakistan

Kondisi fiskal Pakistan mengalami tekanan struktural yang signifikan. Negara ini menghadapi defisit anggaran yang tinggi, ketergantungan pada pembiayaan luar negeri, dan sistem perpajakan yang lemah. Faktor utama yang membatasi ruang fiskal pemerintah diantaranya adalah ketidakefisienan dalam pengumpulan pajak, tingginya sektor informal, dan kurangnya kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak.

Selain itu, **pengeluaran pemerintah Pakistan didominasi oleh sektor pertahanan dan pembayaran utang**, yang menyerap sebagian besar anggaran nasional seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur yang sama pentingnya. Untuk menstabilkan perekonomian, Pakistan meminta bantuan dari lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF).

Pada tahun 2019, Pakistan menandatangani program Extended Fund Facility (EFF) dengan IMF senilai USD 6 miliar untuk membantu memperbaiki neraca pembayaran dan mengendalikan defisit fiskal. Namun, implementasi reformasi fiskal seringkali terhambat oleh instabilitas politik dan resistensi dari kelompok yang mempunyai kepentingan domestik. **Kondisi fiskal Pakistan dapat ditandai dari defisit struktural yang kronis dan pertumbuhan utang yang cepat serta lemahnya kapasitas institusional** dalam pengelolaan anggaran.

2.4.2 Perkembangan Investasi Asing di Pakistan

Pakistan mengalami dinamika yang fluktuatif dalam hal investasi asing yang dikarenakan oleh pengaruh kondisi politik dan stabilitas keamanan, serta kebijakan ekonomi pemerintah. Investasi asing di Pakistan menunjukkan peningkatan yang tajam terutama pada saat Pakistan menjadi mitra utama Amerika Serikat dalam perang melawan terorisme. Dukungan politik ini dibarengi dengan berbagai insentif ekonomi, termasuk reformasi perdagangan dan liberalisasi ekonomi. Namun, ketidakstabilan politik dalam negeri dan ancaman terorisme turut memengaruhi persepsi investor terhadap risiko berusaha di negara tersebut.

Lonjakan investasi asing muncul di Pakistan yaitu sejak diluncurkannya proyek China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) pada tahun 2015, Proyek infrastruktur besar seperti pembangunan pelabuhan Gwadar, jaringan jalan, dan pembangkit listrik menjadi titik fokus dari investasi ini. Saat itu CPEC dianggap sebagai tonggak penting dalam mengubah kondisi ekonomi Pakistan.

Namun, kendala struktural seperti birokrasi yang lambat, dan regulasi yang tidak stabil tetap menjadi hambatan utama dalam menarik investor asing secara luas. Menurut laporan Bank Dunia, Pakistan masih menghadapi tantangan besar dalam hal

kemudahan berusaha, peringkatnya tetap berada di bawah banyak negara Asia Selatan lainnya dalam Indeks kemudahan berbisnis (*Ease of Doing Business Index*). Selain itu Pakistan juga masih menghadapi berbagai tantangan internal yang dapat menghalangi optimalisasi potensi investasinya.

2.4.3 Situasi Perdagangan Lintas Batas

Perdagangan lintas batas merupakan bagian vital dalam ekonomi Pakistan karena posisi geografisnya yang strategis sebagai penghubung antara Asia Selatan, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Perdagangan lintas batas Pakistan menunjukkan potensi besar, tetapi juga menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi struktural maupun geopolitik.

Secara historis, Pakistan memiliki hubungan dagang aktif dengan negara-negara tetangga seperti Afghanistan, Iran, dan Tiongkok. Jalur perdagangan utama yaitu pelabuhan Karachi dan Gwadar di bagian selatan serta pos perbatasan darat seperti Torkham untuk hubungan dagang dengan Afghanistan, dan Taftan (kota kecil diperbatasan) untuk hubungan dagang dengan Iran, serta Khunjerab Pass (Jalur gunung di perbatasan) untuk hubungan dagang dengan Tiongkok. Namun, perdagangan lintas batas paling signifikan terjadi antara Pakistan dan Afghanistan. Volume perdagangan resmi antara kedua negara mengalami fluktuasi, yang dipengaruhi oleh ketegangan politik, penutupan perbatasan, dan kebijakan tarif yang tidak stabil..

Meskipun Pakistan memiliki potensi besar sebagai pusat perdagangan lintas batas, kenyataannya masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari kondisi keamanan, keterbatasan infrastruktur, hingga konflik politik yang memengaruhi hubungan dagang dengan negara-negara sekitarnya.

2.5 Sektor Keamanan Sosial

2.5.1 Perkembangan Radikalisasi Masyarakat Pakistan

Radikalisasi dilingkungan masyarakat Pakistan cukup kompleks dan berlangsung secara bertahap sejak 1980-an. Perkembangan radikalisasi ini tidak terlepas dari perkembangan atau dinamika politik domestik, kebijakan negara, intervensi asing, serta peran kelompok militan yang menjadikan ideologi keagamaan sebagai alat mobilisasi massa.

Pemerintah Pakistan, di bawah kepemimpinan Presiden Zia-ul-Haq, menjalankan kebijakan Islamisasi sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas nasional berbasis Islam Sunni dan mendukung pertumbuhan madrasah-madrasah konservatif. Madrasah-madrasah ini menjadi tempat rekrutmen bagi para mujahidin yang dikirim untuk berperang di Afghanistan. Dalam jangka panjang, mereka menjadi benih kelompok-kelompok militan yang membawa ideologi radikal kembali ke dalam masyarakat Pakistan.

Salah satu aspek penting dalam proses radikalisasi adalah sistem pendidikan keagamaan dimana ribuan madrasah di Pakistan beroperasi tanpa pengawasan negara yang memadai. Sebagian besar dari mereka mengajarkan tafsir Islam yang sempit dan intoleran terhadap sekte-sekte lain, khususnya terhadap Syiah dan Ahmadiyah. Pemerintah Pakistan mencatat sekitar 20.000 hingga 25.000 madrasah yang aktif hingga awal dekade 2010-an, banyak di antaranya tidak terdaftar dan tidak mengikuti kurikulum nasional.

Selain itu radikalisasi juga diperparah oleh meningkatnya konflik sektarian, terutama antara komunitas Sunni dan Syiah. Selain itu narasi-narasi atau kampanye kebencian terhadap Syiah semakin memperburuk radikalisasi di negara tersebut..

Kecenderungan negara yang membiarkan bahkan memfasilitasi eksistensi kelompok ekstrem turut memperkuat posisi kelompok radikal di masyarakat selama mereka tidak mengancam stabilitas kekuasaan negara. Disisi lain Pemerintah Pakistan sering dikritik

karena memainkan politik dua muka dalam menghadapi kelompok radikal. Sementara negara menindak keras kelompok yang dianggap mengancam keamanan domestik seperti TTP, namun disisi lain menunjukkan toleransi terhadap kelompok yang dianggap berguna untuk kepentingan strategis di Kashmir dan Afghanistan, seperti Lashkar-e-Taiba dan Haqqani Network.

Kebijakan yang tidak memiliki kepastian ini tidak hanya melemahkan supremasi hukum, tetapi juga memperkuat dugaan bahwa kekerasan atas nama agama dapat ditoleransi selama mendukung kepentingan nasional

2.5.2 Nilai-Nilai Pluralisme Masyarakat Pakistan

Pluralisme di Pakistan berakar dari sejarah pembentukannya sebagai negara yang menjanjikan tempat aman bagi umat Islam, namun kenyataannya, sejak awal kemerdekaan Pakistan pada tahun 1947 negara ini telah menjadi rumah bagi berbagai kelompok agama dan etnis seperti Hindu, Kristen, Sikh, Ahmadiyah, serta komunitas etnis seperti Punjabi, Sindhi, Pashtun, Baloch, dan Mohajir.

Dalam kerangka sosial, pluralisme di Pakistan ditandai oleh prinsip konstitusional yang mengakui hak-hak minoritas. Konstitusi Pakistan 1973 menjamin kebebasan beragama dan perlindungan terhadap minoritas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak menjalankan agama dan ibadahnya secara bebas. Namun, pelaksanaan nilai-nilai ini sering kali menghadapi tantangan serius dari gerakan ekstremisme dan interpretasi hukum-hukum keagamaan yang sempit.

Tokoh pendiri Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, dalam pidatonya pada 11 Agustus 1947, menegaskan pentingnya prinsip pluralisme dan menyatakan bahwa semua warga negara Pakistan tanpa memandang agama atau kepercayaan, adalah setara di hadapan negara. Pernyataan ini menjadi fondasi normatif pluralisme

Pakistan, meskipun dalam praktiknya mengalami fluktuasi tergantung pada konstelasi politik dan sosial yang berkembang. Namun demikian secara umum masyarakat Pakistan dapat menerima dan saling menghargai perbedaan tradisi dari berbagai etnis yang ada di negara tersebut.

Namun, sejak akhir 1980-an, muncul tantangan besar terhadap pluralisme di Pakistan seiring menguatnya Islamisasi yang digerakkan oleh pemerintahan Jenderal Zia-ul-Haq. Proses ini menguatkan peran agama dalam kebijakan negara dan mempersempit ruang bagi kelompok minoritas, terutama melalui penerapan hukum-hukum seperti Undang-Undang Penodaan Agama. Meskipun demikian, masih ada upaya dari masyarakat sipil, LSM, dan sebagian elit politik untuk mempertahankan semangat pluralisme melalui dialog lintas agama dan advokasi kebebasan sipil.

Pluralisme tidak sepenuhnya hilang, namun terus mengalami tekanan yang kuat seiring perkembangan politik dan keamanan domestik.

2.5.3 Situasi Antar Etnis Pasca masuknya Pengungsi Dari Afghanistan.

Kebangkitan Taliban, menciptakan dampak sosial yang signifikan terhadap berbagai etnis di Pakistan. Negara ini secara historis memiliki keragaman etnis yang kompleks, termasuk etnis Punjabi, Pashtun, Sindhi, Baloch, dan lainnya, yang kini harus menghadapi tekanan baru akibat migrasi besar-besaran yang berasal dari Afghanistan masuk ke wilayah Pakistan.. Mayoritas pengungsi Afghanistan yang masuk ke Pakistan berasal dari etnis Pashtun. Mereka menetap di wilayah barat laut seperti Khyber Pakhtunkhwa dan Baluchistan di mana komunitas Pashtun lokal juga menetap disana. Pemerintah Pakistan memandang kehadiran pengungsi sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional selain dianggap

membebani ekonomi, mereka juga dikaitkan dengan kelompok militan lintas batas khususnya terhadap kaum Pashtun..

Stigma yang melekat pada pengungsi berdampak pada warga Pashtun Pakistan, yang mengalami pemeriksaan dan diskriminasi yang semakin meningkat dari aparat keamanan. Banyak dari mereka diperlakukan seolah-olah adalah imigran ilegal atau bahkan ekstremis, tanpa pembedaan yang jelas. Sementara itu, kelompok minoritas lain seperti etnis Hazara yang melarikan diri dari kekerasan sektarian dan penindasan oleh Taliban mengalami marginalisasi ganda. Selain menghadapi tantangan administratif terkait status pengungsi, mereka juga menjadi target kekerasan berbasis sektarian di wilayah seperti Quetta.

Kehadiran pengungsi telah mengubah kehidupan sosial di sejumlah wilayah perbatasan. Banyak pengungsi yang telah menetap selama puluhan tahun namun belum mendapatkan status kewarganegaraan. Situasi ini menandakan bahwa masuknya pengungsi dari Afghanistan tidak hanya berdampak pada beban ekonomi atau keamanan nasional, tetapi juga menciptakan dinamika baru dalam hubungan antar etnis di Pakistan.

Dari rangkaian ulasan keamanan nasional Pakistan dengan menggunakan pendekatan keamanan dari Barry Buzan terhadap lima sektor keamanan nasional Pakistan secara keseluruhan dapat diketahui bahwa keamanan nasional Pakistan sebelum tahun 2021 adalah dalam kondisi yang rentan.

3. KESIMPULAN

Dari hasil analisis data yang dilakukan melalui pendekatan terhadap 5 sektor keamanan (Barry Buzan) diperoleh hasil, sebagai berikut:

3.1 Sektor keamanan Militer.

Kemenangan Taliban telah memperkuat semangat dan kapasitas kelompok militan lintas batas seperti TTP (Tehrik-i-Taliban Pakistan) dalam meningkatkan frekuensi serangan terhadap aparat keamanan Pakistan. Ketidakstabilan keamanan di

wilayah perbatasan dan meningkatnya aktivitas terorisme menjadi tantangan utama bagi angkatan bersenjata Pakistan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan dalam negeri.

3.2 Sektor keamanan Politik.

Kebangkitan Taliban turut mempengaruhi dinamika politik domestik Pakistan, terutama dalam isu kebijakan luar negeri dan hubungan diplomatiknya. Pemerintah Pakistan dihadapkan pada dilema antara mendukung stabilitas kawasan atau menghindari legitimasi penuh terhadap rezim Taliban,

3.3 Sektor keamanan Lingkungan.

Serangan dan konflik bersenjata penyebab terjadinya eksodus pengungsi di wilayah perbatasan telah menyebabkan degradasi lingkungan, kerusakan infrastruktur sipil, serta eksploitasi sumber daya secara tidak terkendali menambah kerusakan lingkungan di daerah perbatasan.

3.4 Sektor keamanan Ekonomi.

Konflik yang dipicu oleh kebangkitan Taliban memunculkan beban fiskal yang besar bagi pemerintah Pakistan, terutama dalam menangani arus pengungsi. Selain itu, ketidakpastian keamanan telah menurunkan kepercayaan investor asing dan mengganggu aktivitas perdagangan lintas batas, yang selama ini menjadi sumber pendapatan penting bagi wilayah barat Pakistan. Selain itu biaya pertahanan meningkat dan menyedot anggaran dari sektor lain.

3.5 Sektor keamanan Sosial.

Masuknya ratusan ribu pengungsi Afghanistan ke wilayah Pakistan turut menimbulkan tantangan sosial. Tekanan terhadap meningkatnya potensi radikalisme, serta konflik horizontal antar kelompok etnis menjadi indikator melemahnya keamanan sosial. Selain itu, pluralisme masyarakat Pakistan juga diuji dengan menguatnya paham konservatif akibat arus pengaruh ideologi dari rezim Taliban.

Dari hasil analisis terhadap temuan-temuan dari kelima sektor keamanan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

“Kebangkitan Taliban pada tahun 2021 memberikan dampak signifikan terhadap keamanan nasional Pakistan, yang tercermin melalui meningkatnya ketegangan militer di wilayah perbatasan, dinamika politik domestik yang tidak stabil, kerusakan terhadap kelestarian lingkungan, gangguan pada sektor ekonomi, dan meningkatnya beban sosial akibat arus pengungsi”.

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa stabilitas keamanan nasional Pakistan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan militer di Afghanistan, khususnya setelah kebangkitan Taliban pada tahun 2021. Ketergantungan geografis, hubungan historis, serta kerentanan sosial-politik di wilayah perbatasan memperkuat dampak lintas batas yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penting bagi Pakistan untuk memperkuat kapasitas keamanan domestik, mengembangkan kebijakan diplomatik yang adaptif terhadap rezim Taliban, serta memastikan penanganan isu pengungsi dan radikalisme secara berkelanjutan.

Kondisi keamanan nasional Pakistan sebelum 2021 yang sudah rentan semakin lebih rentan sejak kebangkitan Taliban di Afghanistan pada Tahun 2021.

REFERENSI

Giustozzi, Antonio. "Taliban 2.0: The Afghan Insurgency's Evolution and the Road to Victory." 2022.

International Crisis Group. *The Taliban's Advance in Afghanistan*. Asia Briefing No. 168. Brussels: International Crisis Group, 2021.

Nurfitriyani, Resti. "Perubahan Pandangan Pemerintah Pakistan terhadap Pengungsi Afghanistan: Antara Ancaman Keamanan Nasional dan Perlindungan Hak-Hak Pengungsi." Tesis. Universitas Gadjah Mada, 2025.

Rashid, Ahmed. *Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia*. New Haven: Yale University Press, 2000.

UNHCR. "Afghanistan Situation Regional Refugee Response." Geneva: UNHCR, 2021.

Yusuf, Moeed. *Brokering Peace in Nuclear Environments: U.S. Crisis Management in South Asia*. Stanford: Stanford University Press, 2018.